

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN *ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE* (OSCE)

Bab ini menjelaskan tentang *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) mulai dari sejarah pembentukannya yaitu dari sebuah konferensi yang disebut *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE), kemudian perubahan dari CSCE menjadi OSCE. Setelah itu dijelaskan lebih dalam mengenai keanggotaan dari OSCE itu sendiri dan pendanaan organisasi tersebut. Akan dijelaskan juga tugas dari OSCE yang mencakup aspek politik-militer, ekonomi dan lingkungan, serta dimensi manusia. Kemudian menjelaskan struktur OSCE dan fungsinya. Terakhir adalah misi-misi yang ditangani oleh OSCE yang didalamnya dijelaskan pula pembentukan OSCE *Minks Group*.

A. Pembentukan *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE)

Pada bulan Juli 1973, para Menteri Luar Negeri dari 33 negara Eropa dan Amerika Serikat menggelar *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE), di Helsinki. Dibentuknya CSCE ini telah memberikan kemajuan dalam berbagai masalah keamanan, politik, ekonomi dan isu-isu lain yang menjadi perhatian bersama. (CSCE, 2018) Konferensi melayani tujuan menyatukan dua negara adidaya, sekutu mereka dan negara-negara nonblok selama Perang Dingin, untuk menyelesaikan tantangan umum dan bekerja menuju promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Euro-Atlantik. (Beqiraj, 2011)

Mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, bersama dengan masalah kemanusiaan lainnya, telah menjadi

landasan kerja dari CSCE. Berakhirnya Perang Dingin telah memungkinkan perluasan komitmen ke bidang-bidang baru, seperti pemilihan yang bebas dan adil, supremasi hukum, konflik regional, integritas teritorial dan kedaulatan. Tantangan yang umum bagi sebagian besar negara yang berpartisipasi juga semakin menonjol dalam masalah perdagangan manusia, manifestasi anti-Semitisme, dan perlakuan terhadap Roma serta minoritas baru atau minoritas lainnya yang berkembang di Eropa. Komisi juga telah meningkatkan aktivitas di bidang lain, seperti mempromosikan keamanan energi, melindungi lingkungan dan memberantas korupsi melalui transparansi ekonomi, serta menangani proliferasi senjata, mendukung inisiatif resolusi konflik dan memerangi terorisme. (Beqiraj, 2011)

B. Perubahan Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) menjadi *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE)

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) memiliki asal-usulnya di awal 1950-an, ketika Uni Soviet pertama kali mengusulkan pembentukan konferensi keamanan semua-Eropa. Pada tanggal 1 Agustus 1975, para Perdana Menteri dari 35 negara peserta berkumpul di Helsinki dan menandatangani Akta Final Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yang dikenal sebagai Kesepakatan Helsinki, Akta Final ini merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara politik yang terdiri dari tiga bagian utama yang secara informal dikenal sebagai "keranjang", yang diadopsi berdasarkan konsensus. Undang-undang yang komprehensif ini berisi berbagai tindakan yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kerja sama di wilayah yang membentang dari Vancouver ke Vladivostok. (CSCE, 2018)

- a. Keranjang I - Dimensi Keamanan - berisi Deklarasi Prinsip-Prinsip Panduan Hubungan antara negara-negara peserta, termasuk Prinsip VII yang sangat penting tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Ini juga mencakup bagian tentang langkah-langkah membangun kepercayaan

- dan aspek-aspek lain dari keamanan dan perlucutan senjata yang ditunjukkan untuk meningkatkan transparansi militer.
- b. Keranjang II - Dimensi Ekonomi - mencakup kerjasama ekonomi, ilmiah, teknologi dan lingkungan, serta tenaga kerja migran, pelatihan kejuruan dan promosi pariwisata.
 - c. Keranjang III – Dimensi Manusia - dikhususkan untuk kerja sama di bidang kemanusiaan dan lainnya: gerakan orang yang lebih bebas; kontak manusia, termasuk reunifikasi keluarga dan kunjungan; kebebasan informasi, termasuk kondisi kerja untuk wartawan; dan pertukaran budaya dan pendidikan.

Dengan relaksasi hubungan politik di kawasan Eropa-Atlantik pada akhir 1980-an, negara yang berpartisipasi dalam CSCE kembali menilai status perdamaian dan keamanan di Eropa dan peran konferensi dalam hal itu. Transisi dari konferensi menjadi organisasi adalah akibat dari serangkaian konferensi, pertemuan, dan seminar yang menghasilkan keputusan bahwa organisasi dinilai memiliki tujuan yang lebih jelas di masa depan serta dapat ditetapkan basis institusionalnya. Kesadaran akan keterkaitan interdependensi antara keamanan dan hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum adalah prinsip dasar atas Akta Final Helsinki. Selama bertahun-tahun, CSCE semakin memperdalam dan memperluas dimensi manusia dari keamanan. Pertemuan Pertama tentang Dimensi Manusia CSCE yang diadakan di Paris pada tahun 1989 dan ditindaklanjuti di Kopenhagen tahun berikutnya mewakili sebuah contoh yang jelas dari pergeseran fokus dalam sifat kerjasama dan keamanan di Eropa. (Ghebali, 2005)

Dalam Piagam Paris untuk Eropa baru, diadopsi pada kesimpulan KTT Paris pada tahun 1990, yang dengan jelas menyatakan bahwa perubahan dalam politik lingkungan telah melahirkan "era baru demokrasi, perdamaian dan persatuan" di Eropa. Untuk menghadapi tantangan baru dari era pasca perang dingin, seperti runtuhnya negara, terhenti transisi ke demokrasi dan perlindungan minoritas, (Galbreath, 2007) kemudian

ditegaskan kembali dalam Piagam Paris mengenai validitas permanen dari sepuluh prinsip diabadikan dalam Akta Final, "memutuskan untuk memberikan dorongan baru" untuk bekerja sama menetapkan prosedur yang diperlukan dan pengaturan kelembagaan untuk tujuan tersebut dalam sebuah dokumen tambahan. (Barberini, 2004)

KTT Helsinki pada tahun 1992 menjadi penting dalam proses perubahan bentuk konferensi menjadi organisasi. Perhatian tidak hanya terfokus pada peninjauan pelaksanaan komitmen CSCE, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan dimensi manusia, tetapi di atas semua itu pada penilaian rekam jejak operasional lembaga yang baru didirikan dan tentang bagaimana meningkatkan efektivitas dan ketajaman CSCE. (Barberini, 2004) Oleh karena itu, dalam Deklarasi KTT Budapest 1994 para anggota konferensi sepakat untuk melakukan perubahan nama dari CSCE menjadi OSCE. Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1995. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa terlibat dalam pengaturan standar di bidang-bidang termasuk keamanan militer, kerjasama ekonomi dan lingkungan, dan hak asasi manusia dan masalah kemanusiaan. Selain itu, OSCE melakukan berbagai inisiatif diplomasi preventif yang dirancang untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik di dalam dan di antara Negara-negara peserta. OSCE memiliki kantor pusatnya di Wina, Austria, tempat pertemuan mingguan Dewan Tetap diadakan. Selain itu, seminar dan pertemuan khusus diadakan di berbagai lokasi dan konsultasi berkala diadakan di antara Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara atau Pemerintahan. OSCE terus berkembang untuk mengatasi ancaman dan tantangan, sementara tetap berakar prinsip-prinsip pendiriannya.

C. Keanggotaan dan Pendanaan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE)

a. Keanggotaan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE)

Keanggotaan OSCE dibagi menjadi negara peserta dan mitra kerjasama. Negara peserta dalam OSCE terdiri dari 57 negara di Amerika Utara, Eropa dan Asia, dan menjadi organisasi keamanan regional terbesar di dunia. (OSCE, 2018) Dimana negara yang pertama bergabung dengan OSCE adalah Albania pada 19 Juni 1991 dan negara ke 57 atau yang terakhir bergabung dengan OSCE adalah Mongolia pada 21 November 2012. Penjelasan lebih lengkap mengenai keanggotaan OSCE akan ditampilkan dalam Tabel pada Lampiran I.¹ Sedangkan, mitra kerjasama OSCE dibagi menjadi dua, yaitu Mitra Kerjasama Asia yang terdiri dari Afghanistan, Australia, Jepang, Republik Korea, Thailand, serta Mitra Kerjasama Mediterania yang terdiri dari Aljazair, Egypt, Israel, Jordan, Morocco, Tunisia. (OSCE, 2018)

Mitra Kerjasama Mediterania berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan anti-terorisme, keamanan perbatasan, pengelolaan air, tantangan keamanan lingkungan, manajemen migrasi, dialog antarbudaya dan antaragama, toleransi dan non-diskriminasi. Mitra Kerjasama Asia melihat ke arah pendekatan komprehensif OSCE terhadap keamanan dan langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan sebagai sumber inspirasi bagi wilayah mereka sendiri. Mereka juga berbagi pengalaman dalam menanggapi ancaman transnasional, mengelola perbatasan, mengatasi masalah transportasi, memberantas perdagangan manusia, membangun lembaga-lembaga demokratis dan menyelenggarakan pemilu.

¹ Lampiran I berada pada halaman 99

b. Pendanaan Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Dalam hal pendanaan, OSCE didanai oleh kontribusi dari 57 negara pesertanya. OSCE mempekerjakan sekitar 550 orang di berbagai lembaga dan sekitar 2.330 dalam operasi lapangannya. Anggota staf didanai oleh administrasi nasional OSCE. Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam OSCE, dan untuk mencegah pemborosan, penipuan, dan manajemen yang salah, sebuah tim auditor internal dan eksternal independen secara teratur memeriksa dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Dalam kasus dugaan kelalaian keuangan yang mempengaruhi organisasi, penyelidikan dilakukan untuk menetapkan fakta dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal. Semua audit, evaluasi, dan investigasi dilakukan sesuai dengan standar internasional. (OSCE, 2018) Dalam setiap tahunnya, OSCE mengeluarkan dana untuk membiayai kegiatan organisasinya yang disebut anggaran terpadu. Anggaran terpadu OSCE untuk kegiatan organisasinya sejak tahun 2008-2017 adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1 Anggaran Terpadu OSCE Tahun 2008-2017



Sumber : www.osce.org/annual-report/2008-2017 (2018)

Dalam anggaran terpadu OSCE Tahun 2008-2017 dapat dilihat bahwa anggaran yang dikeluarkan OSCE cenderung semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2008-2017 ada beberapa pendanaan yang dihilangkan seperti dana untuk kantor di Zagreb, misi di Georgia, dan dana cadangan, serta ada penurunan pendanaan pada misi lain tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu berbeda jauh. Anggaran terbesar ada pada tahun 2008 dengan jumlah EUR 164.168.200 dan yang terkecil pada tahun 2017 dengan jumlah EUR 138.982.600. Jika dirata-rata, sejak tahun 2008-2017 anggaran terpadu pertahun OSCE adalah EUR 148.227.010.

D. Tugas *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE)

OSCE bekerja untuk stabilitas, perdamaian dan demokrasi bagi lebih dari satu miliar orang, melalui dialog politik tentang nilai-nilai bersama dan melalui kerja praktis yang berkontribusi terhadap kemajuan yang berkelanjutan. Konsep keamanan komprehensif OSCE mencakup politik-militer; ekonomi dan lingkungan; dan dimensi manusia. (Beqiraj, 2011)

a. Politik-Militer

ii. Kontrol Senjata

Dokumen pendirian OSCE, Akta Final Helsinki tahun 1975, menetapkan kebutuhan untuk berkontribusi mengurangi bahaya konflik bersenjata dan kesalahpahaman atau salah perhitungan kegiatan militer yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Kontrol Senjata yang disepakati pada tahun 1996 menjelaskan bahwa pengendalian senjata, termasuk perlucutan senjata dan pembangunan kepercayaan dan keamanan, merupakan bagian integral dari konsep keamanan komprehensif dan kooperatif OSCE. (OSCE, 2018)

iii. Manajemen Perbatasan

OSCE berkomitmen untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan terhadap ancaman lintas batas dan kebebasan bergerak untuk orang, barang, jasa dan perdagangan. OSCE mendukung upaya negara dan mitra yang berpartisipasi untuk kerjasama memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dengan perbatasan dan untuk mempromosikan kerjasama di antara mereka. Sejumlah operasi lapangan OSCE mendukung manajemen perbatasan yang efektif termasuk mempertahankan kehadiran di zona perbatasan, mendukung kerjasama dan berbagi informasi cepat antara polisi perbatasan dan rekan-rekan negara tetangga.

iv. Melawan Terorisme

Negara-negara peserta OSCE setuju bahwa terorisme adalah salah satu ancaman paling signifikan terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta untuk menikmati hak asasi manusia dan pembangunan sosial dan ekonomi, di wilayah OSCE dan seterusnya. Terorisme berusaha merusak nilai-nilai yang menyatukan OSCE. OSCE mempromosikan pendekatan untuk melawan terorisme di semua tingkatan, termasuk koordinasi antara otoritas nasional, kerjasama antara negara-negara, kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan, dan pembentukan masyarakat kemitraan antara otoritas negara, sektor swasta (komunitas bisnis, industri), masyarakat sipil dan media. Upaya-upaya ini dipandu oleh dan mendukung strategi anti terorisme global PBB dan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan Kerangka Kerja Konsolidasi OSCE untuk Melawan Terorisme.

v. Pencegahan dan Penyelesaian Konflik

OSCE bekerja untuk mencegah konflik timbul dan memfasilitasi penyelesaian politik komprehensif yang komprehensif dari konflik yang ada dan juga mempromosikan pemulihan perdamaian dan rehabilitasi pasca-konflik. Untuk itu, OSCE bekerja dengan semua aktor yang relevan, termasuk bermitra dengan organisasi internasional dan regional, seperti

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alat utama OSCE untuk mengatasi siklus konflik termasuk jaringan operasi lapangan dan Pusat Pencegahan Konflik yang bertindak sebagai badan peringatan dini OSCE, memfasilitasi dialog, mendukung mediasi dan upaya pencegahan dan resolusi konflik lainnya.

vi. Polisi

OSCE membahas ancaman transnasional ini melalui strategi komprehensif yang berfokus pada pembangunan layanan polisi modern, demokratis dan proaktif yang mampu menanggapi ancaman transnasional yang terus berubah. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepolisian OSCE merupakan bagian integral dari upaya Organisasi dalam pencegahan konflik, manajemen krisis dan rehabilitasi pasca-konflik. Di dalam Sekretariat OSCE, Satuan Masalah Polisi Strategis Transnasional Departemen Kepolisian / *Strategic Police Matters Unit* (SPMU) sebagai kepolisian OSCE memiliki dua tugas utama yaitu pengembangan dan reformasi polisi dalam prinsip-prinsip pemolisian demokratis, dan membangun kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dari negara-negara dan mitra yang berpartisipasi OSCE untuk kerjasama agar dapat secara efektif melawan kejahatan transnasional terorganisir, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan kejahatan dunia maya.

vii. Reformasi dan Kerjasama dalam Sektor Keamanan

Kode Etik OSCE pada Aspek Keamanan Politik-Militer adalah dokumen kunci dalam hal ini dan menetapkan norma-norma dasar untuk kontrol demokratis terhadap pasukan bersenjata dan keamanan, serta memastikan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi personel pasukan bersenjata. OSCE juga telah mengembangkan kegiatan-kegiatan praktis di bidang reformasi dan kerjasama dalam sektor keamanan termasuk reformasi perundang-undangan, perampingan dan / atau konversi tentara, personel pelatihan tentang hak-hak prajurit dan wanita servis serta hukum humaniter. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh sejumlah operasi lapangan OSCE,

Kantor OSCE untuk Lembaga Demokratis dan Hak Asasi Manusia / *OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR), dan Pusat Pencegahan Konflik. Semuanya bekerja erat dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil.

b. Ekonomi dan Lingkungan

i. Aktivitas Ekonomi

Kesenjangan ekonomi dan sosial, kurangnya penegakan hukum, pemerintahan yang lemah, korupsi, kemiskinan yang meluas dan pengangguran yang tinggi adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi ilegal dan ancaman lain terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah OSCE. OSCE mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memupuk kerjasama ekonomi internasional dalam berbagai isu untuk melawan ancaman-ancaman ini. Di dalam Sekretariat, Kantor Koordinator Kegiatan Ekonomi dan Lingkungan OSCE / *Office of the Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities* (OCEEA) bekerja dengan operasi lapangan OSCE dan lembaga-lembaga untuk mendukung Negara-negara yang berpartisipasi dalam melaksanakan komitmen mereka di bidang ekonomi dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan nasional pada bidang tata pemerintahan yang baik dan anti-korupsi, anti-pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme, transportasi, perdagangan, dan fasilitasi penyeberangan perbatasan, dan migrasi tenaga kerja.

ii. Kegiatan Lingkungan

Mengenali hubungan erat antara lingkungan dan keamanan, OSCE bertujuan untuk memperkuat kerjasama pada isu-isu lingkungan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah konflik, membangun rasa saling percaya dan mempromosikan hubungan baik dengan tetangga. Bekerja dalam kemitraan dengan organisasi internasional, pemerintah nasional dan masyarakat sipil, OSCE menangani masalah lingkungan dan keamanan di berbagai bidang. Mendukung proyek dan kegiatan untuk memastikan pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan, terutama air, di dalam dan di antara negara-negara, mengurangi risiko bencana, mengatasi tantangan perubahan iklim dan mengelola limbah berbahaya dengan aman.

iii. Pemerintahan yang Baik

Tata pemerintahan yang baik di semua tingkatan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan. OSCE bekerja untuk mengatasi banyak aspek pemerintahan yang lemah, termasuk korupsi dan pencucian uang, dan untuk mempromosikan penghormatan penuh terhadap aturan hukum, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan perundang-undangan yang efektif sebagai dasar dari fungsi negara. Mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan memberantas korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme adalah salah satu kegiatan utama dari OCEEA. Kegiatan ini didasarkan pada sejumlah Keputusan Dewan Menteri dan Tetap OSCE, termasuk Keputusan Dewan Menteri Basel 2014 tentang Pencegahan Korupsi dan Deklarasi Dewan Menteri Dublin 2012 tentang Penguatan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan Korupsi, Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

c. Dimensi Manusia

i. Memberantas Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia mempengaruhi hampir semua negara OSCE, baik sebagai negara asal atau tujuan. Bentuk perbudakan modern ini merupakan penghinaan terhadap martabat manusia, sering kali melibatkan teror psikologis dan kekerasan fisik. Perdagangan manusia melibatkan isu-isu hak asasi manusia dan supremasi hukum, penegakan hukum dan kontrol kejahatan, ketidaksetaraan dan diskriminasi, korupsi, perampasan ekonomi dan migrasi. Pada tahun 2003, OSCE membentuk kantor dan pos perwakilan dan koordinator khusus untuk memberantas perdagangan manusia untuk membantu negara-negara yang berpartisipasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk memerangi perdagangan manusia.

Mereka menyelenggarakan seminar dan kursus pelatihan untuk, antara lain, polisi, penjaga perbatasan, hakim, jaksa, pengacara, pekerja sosial, pemimpin agama, media; survei dan studi; dan kampanye informasi untuk publik.

ii. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

OSCE dan negara yang berpartisipasi bekerjasama pada langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mengurangi risiko konflik yang berasal dari penggunaan TIK. OSCE dan lembaga-lembaganya juga fokus pada penanganan ancaman keamanan *cyber* / TIK dari aktor non-negara, seperti penjahat terorganisir dan teroris. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan tanggapan yang memadai dan tepat waktu oleh otoritas nasional terhadap ancaman yang berkembang, mulai dari forensik yang lebih baik hingga pendekatan inovatif untuk mencegah TIK menjadi fasilitator taktis bagi teroris.

iii. Demokratisasi

OSCE membantu Negara-negara peserta membangun dan mengkonsolidasikan lembaga-lembaga demokratis. Membantu pemerintah menjadi lebih responsif, bertanggung jawab, dan representatif. Sebagai salah satu badan hak asasi manusia regional utama di dunia, kantor ODIHR bekerja dengan lembaga pemerintah, partai politik dan parlemen, dan membantu masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan. ODIHR juga mendukung upaya Negara-negara peserta dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik, memperkuat parlemen, mengembangkan lanskap politik multipartai, meningkatkan integrasi migran dan memodernisasi sistem pendaftaran penduduk.

iv. Pemilihan

Mengakui bahwa pemilihan demokratis membentuk dasar bagi pemerintah yang sah, OSCE mengamati pemilu di seluruh 57 negara yang berpartisipasi dan juga memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kerangka kerja legislatif dan

administratif untuk pemilihan di negara-negara tertentu. Kantor OSCE untuk Lembaga Demokratis dan Hak Asasi Manusia mengamati pemilihan untuk menilai sejauh mana proses pemilu menghormati kebebasan mendasar dan dicirikan oleh kesetaraan, universalitas, pluralisme politik, kepercayaan diri, transparansi dan akuntabilitas. Beberapa operasi lapangan OSCE melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan, termasuk pelatihan untuk anggota komisi pemilu, media dan polisi, serta inisiatif pendidikan pemilih. Namun, mereka tidak ambil bagian dalam misi pemantauan pemilihan di negara-negara operasinya.

v. Kesetaraan Gender

OSCE mengakui bahwa persamaan hak antara wanita dan pria adalah penting untuk menumbuhkan perdamaian, demokrasi yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi. OSCE bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, serta untuk mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kebijakan dan praktik, baik di dalam Negara-negara yang berpartisipasi maupun Organisasi itu sendiri. Dengan mitra lokal, OSCE mengembangkan dan menjalankan proyek di seluruh wilayah OSCE untuk memberdayakan perempuan, dan membangun kapasitas dan keahlian lokal mengenai isu-isu gender. Bekerja sama dengan pihak berwenang dalam meninjau undang-undang dan membantu dalam membangun mekanisme nasional untuk memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dari 57 negara anggota OSCE telah mengadopsi beberapa kebijakan dan tindakan khusus untuk mendukung kesetaraan gender.

vi. Hak Asasi Manusia

Penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah kunci bagi konsep keamanan komprehensif OSCE. Memperkuat dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah OSCE merupakan inti dari kerja Organisasi. Kantor ODIHR memberikan saran dan bantuan kepada Negara-negara yang berpartisipasi, dan

mendukung individu dan masyarakat sipil dengan pelatihan dan pendidikan. ODIHR mencakup spektrum masalah yang luas, mulai dari kebebasan dasar agama atau keyakinan, gerakan, pertemuan dan asosiasi, hingga pelaporan tentang penggunaan hukuman mati, uji coba pemantauan, dan mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya.

vii. Kebebasan dan Pengembangan Media

Media yang bebas dan independen adalah landasan masyarakat demokratis. OSCE memonitor perkembangan media di negara-negara yang berpartisipasi untuk pelanggaran kebebasan berekspresi. OSCE juga terlibat dalam pengembangan media melalui pelatihan dan dukungan untuk editor dan jurnalis. Perwakilan tentang kebebasan media, lembaga OSCE independen, memiliki mandat unik untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan media di semua 57 negara anggota OSCE. Kegiatan perwakilan termasuk mengamati perkembangan media sebagai bagian dari fungsi peringatan dini dan membantu negara yang berpartisipasi mematuhi komitmen mereka terhadap kebebasan berekspresi.

viii. Migrasi

OSCE berkomitmen untuk mengatasi fenomena migrasi secara lintas-dimensi dan dengan memanfaatkan nilai tambah yang dapat dibawa ke solusi regional dan global. Aset utama organisasi mencakup cakupan geografisnya yang luas, keanggotaannya yang luas dan beragam, fungsi pengaturan normanya dan keterlibatan lintas dimensi, hubungannya dengan Mitra Mediterania dan Asia, dan perluasan lapangan. OSCE memberikan dukungan dalam pengembangan kapasitas, saran kebijakan, peningkatan kesadaran dan advokasi, serta dukungan dialog. Memiliki kebijakan utama dalam menangani migrasi yaitu mengatur migrasi, memfasilitasi migrasi legal, dan mendukung masyarakat dan komunitas dalam kebebasan bergerak dan rujukan pengungsi.

ix. Isu-isu Minoritas Nasional

Komisaris Tinggi OSCE tentang Minoritas Nasional / *High Commissioner on National Minorities* (HCNM) bekerja untuk mengatasi ketegangan etnis dan mencegah permusuhan atas isu-isu minoritas nasional. Sejumlah operasi lapangan OSCE juga bekerja di bidang isu-isu minoritas nasional. Kegiatan mereka fokus pada perlindungan etnis minoritas, mereformasi sistem pendidikan, meningkatkan representasi yang adil, membangun kepercayaan di antara komunitas, dan membina jaringan regional untuk membangun institusi yang berkelanjutan untuk komunitas minoritas dan untuk melindungi hak-hak mereka

x. Toleransi dan non-diskriminasi

Rasisme, xenofobia, dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya terus mengancam keamanan di masyarakat OSCE yang semakin beragam. Oleh karena itu Organisasi mendedikasikan sumber daya dan upaya untuk mempromosikan toleransi dan non-diskriminasi yang menumbuhkan rasa aman yang lebih kuat di Negara-negara yang berpartisipasi. Kantor ODIHR telah mengembangkan program untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi, kejahatan kebencian, anti-Semitisme dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya, termasuk terhadap Islam, Kristen dan anggota agama lain.

xi. Roma dan Sinti

Berabad-abad diskriminasi dan penganiayaan telah mendorong Roma dan Sinti ke pinggiran masyarakat, menjadikan mereka salah satu minoritas yang paling rentan dan dirugikan di Eropa. Banyak yang menjadi korban rasisme, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Wanita dan anak perempuan Roma khususnya sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi. OSCE mempromosikan hak-hak Roma dan Sinti melalui proyek-proyek mengenai partisipasi politik, pendidikan, perumahan, pencatatan sipil, memerangi rasisme

dan diskriminasi, dan melindungi hak-hak orang-orang yang dipindahkan.

xii. Aturan Hukum

Konsep aturan hukum adalah landasan kegiatan hak asasi manusia dan demokratisasi OSCE. Ini tidak hanya mencakup kerangka hukum formal, tetapi juga bertujuan untuk keadilan berdasarkan penerimaan penuh martabat manusia. Negara-negara peserta OSCE terus membutuhkan bantuan dalam mengembangkan sistem peradilan yang menjamin penghormatan hak dan kebebasan fundamental setiap orang secara adil dan independen. Kantor ODIHR mendukung reformasi peradilan dan legislatif untuk memastikan bahwa lembaga peradilan beroperasi bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. ODIHR memantau uji coba untuk menilai jaminan persidangan yang adil dan mempromosikan reformasi berdasarkan prinsip-prinsip aturan hukum di bidang peradilan pidana, perdata dan administratif.

xiii. Pemuda

Komitmen OSCE untuk mempromosikan peran dan memasukkan pemuda dalam agenda perdamaian dan keamanannya berawal dari dokumen pendiriannya, Akta Final Helsinki, dan telah diperkuat melalui banyak keputusan OSCE berikutnya. Dua deklarasi Dewan Menteri berturut-turut, pada tahun 2014 dan 2015, mengakui potensi kaum muda untuk berkontribusi pada pembangunan politik, ekonomi dan sosial dan untuk pekerjaan OSCE di seluruh tiga dimensi konsep keamanan komprehensifnya. Organisasi menempatkan penekanan khusus pada perlindungan pemuda, dan mempromosikan partisipasi pemuda di berbagai bidang seperti mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan dan radikalisme yang mengarah pada dialog terorisme, antarbudaya dan antaragama, pendidikan, toleransi dan non-diskriminasi dan partisipasi politik. Operasi lapangan OSCE di Balkan Barat, Eropa Timur, Kaukasus Selatan dan Asia Tengah menjalankan

proyek dan kegiatan yang berkaitan dengan pemuda dengan mitra mereka di lapangan.

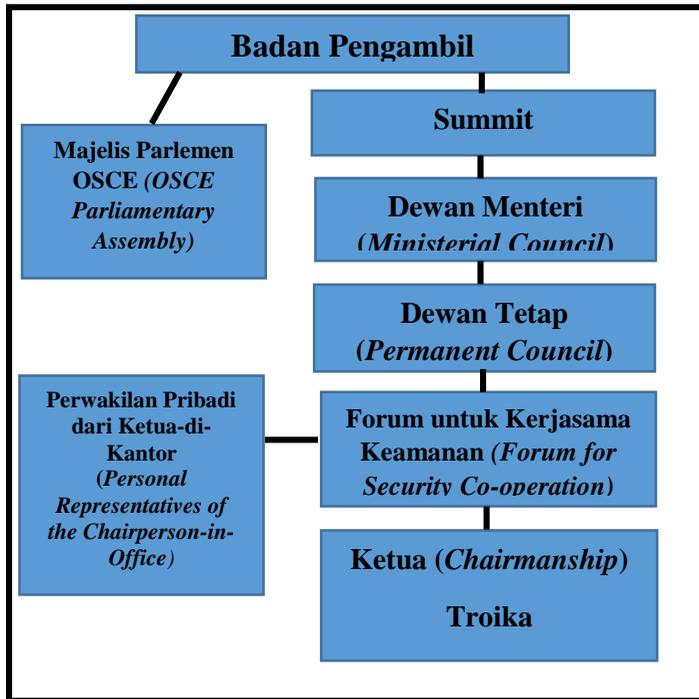
xiv. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan OSCE

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan diadopsi oleh para pemimpin dunia pada KTT PBB yang bersejarah pada bulan September 2015 dan secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Selama lima belas tahun ke depan, negara-negara telah berkomitmen untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs dikelompokkan menjadi lima tema utama: manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Sementara karya OSCE sebagai organisasi keamanan regional terbesar di dunia berpusat pada tema perdamaian, kelima tema ini menentukan area di mana OSCE membuat perbedaan. OSCE telah menegaskan hubungan antara keamanan dan pembangunan berkelanjutan sejak permulaannya dengan penandatanganan Akta Final Helsinki pada tahun 1975. Pendekatan komprehensifnya terhadap keamanan terletak pada pengakuan bahwa konflik dapat muncul tidak hanya dari ancaman politik dan militer tetapi juga dari ketegangan ekonomi, kerusakan lingkungan, ketidakamanan sosial dan pelanggaran hak-hak individu, semuanya relevan untuk pencapaian SDG.

E. Struktur Organisasi Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Struktur OSCE dibagi menjadi badan pengambil keputusan dan eksekutif OSCE. Disamping itu, juga ada badan-badan yang terkait dengan OSCE. (OSCE, 2018)

Bagan 2.2 Struktur OSCE dalam Pengambilan Keputusan



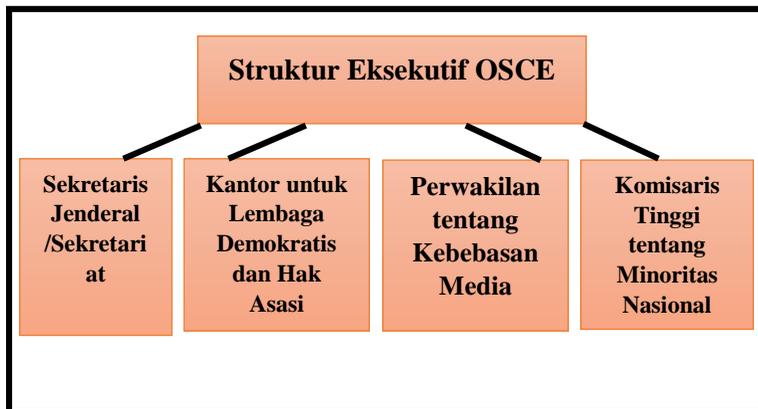
Sumber : www.osce.org/whatistheosce (2018)

Majelis Parlemen OSCE terdiri dari 323 anggota parlemen yang mencakup wilayah geografis dari Vancouver ke Vladivostok. Sebagai forum untuk diplomasi dan debat parlemen, memimpin misi pemantauan pemilu dan memperkuat kerjasama internasional untuk menegakkan komitmen pada isu-isu politik, keamanan, ekonomi, lingkungan dan hak asasi manusia. Majelis juga mengembangkan dan mempromosikan mekanisme untuk pencegahan dan penyelesaian konflik, mendukung pengembangan institusi demokratis di negara peserta, memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada OSCE. *Personal Representatives of the Chairperson-in-Office* ditugasi oleh Ketua untuk bekerja mencegah dan mengelola

konflik di wilayah OSCE, dan memastikan koordinasi di bidang-bidang tertentu seperti isu gender dan pemuda, dan untuk mempromosikan toleransi dan non-diskriminasi.

Summit merupakan rapat Kepala Negara atau Pemerintahan negara-negara peserta OSCE dengan menetapkan prioritas, mengambil keputusan dan memberikan orientasi pada tingkat politik tertinggi. Sedangkan, *Ministerial Council* merupakan pertemuan para menteri luar negeri dari negara peserta OSCE, bertindak sebagai pusat pengambilan keputusan dan badan pengatur OSCE. *Permanent Council* adalah badan reguler untuk dialog politik dan pengambilan keputusan di antara perwakilan semua peserta OSCE, bertemu setiap minggu di Wina. *Forum for Security* yang berpartisipasi bertemu setiap minggu untuk berkonsultasi mengenai stabilitas dan keamanan militer. Negara peserta yang berbeda memegang Ketua OSCE setiap tahun dengan menteri luar negeri negara itu yang bertindak sebagai Ketua-di-Kantor (*Chief in Office*). Ketua *Cooperation* adalah badan pengambilan keputusan otonom di mana perwakilan Negara-negara mengoordinasikan pengambilan keputusan dan menetapkan prioritas OSCE selama tahun jabatannya. Terakhir, troika terdiri dari wakil-wakil dari Ketua saat ini, sebelumnya dan masa depan.

Bagan 2.3 Struktur OSCE dalam Eksekutif OSCE

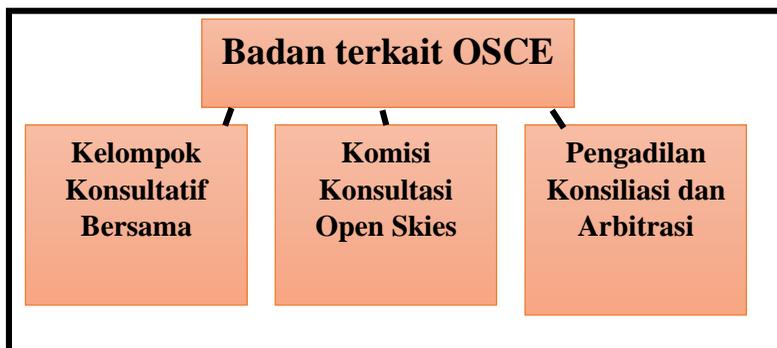


Sumber : www.osce.org/whatistheosce (2018)

Dibawah Badan Pengambilan Keputusan, ada Struktur Eksekutif dari OSCE, dimana Komisaris Tinggi tentang Minoritas Nasional / *High Commissioner on National Minorities* (HCNM) bertugas mengidentifikasi dan mengatasi penyebab ketegangan konflik etnis. HCNM membahas pemicu jangka pendek ketegangan atau konflik antar-etnis yang menimbulkan konflik jangka panjang. HCNM juga berhak memberikan analisis dan saran bagi negara peserta. Kantor OSCE untuk Lembaga Demokratis dan Hak Asasi Manusia / *OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) memberikan dukungan, bantuan dan keahlian kepada negara-negara dan masyarakat sipil yang berpartisipasi untuk mempromosikan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan toleransi dan non-diskriminasi. ODIHR mengamati pemilihan, meninjau undang-undang dan memberi saran kepada pemerintah tentang cara mengembangkan dan mempertahankan lembaga-lembaga demokratis. Selain itu, juga melakukan program pelatihan untuk pemerintah dan pejabat penegak hukum dan organisasi non-pemerintah tentang cara menjunjung, mempromosikan, dan memantau hak asasi manusia.

Kegiatan Perwakilan dapat dibagi menjadi dua kelompok: mengamati perkembangan media sebagai bagian dari fungsi peringatan dini dan membantu negara yang berpartisipasi mematuhi komitmen mereka terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan media. Termasuk upaya untuk menjamin keamanan jurnalis; membantu perkembangan pluralisme media; mempromosikan dekriminialisasi pencemaran nama baik, memerangi kebencian sambil menjaga kebebasan berekspresi; memberikan pendapat ahli tentang peraturan media dan perundang-undangan, mempromosikan kebebasan internet, dan membantu dengan proses beralih dari siaran analog ke digital. Perwakilan juga mengadakan konferensi media regional tahunan, menyatukan jurnalis, perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah, serta akademisi, untuk membahas isu-isu kebebasan media saat ini. Sekretaris Jenderal mengepalai Sekretariat OSCE di Wina, bertindak di bawah bimbingan Ketua. Sekretariat, yang mencakup Pusat Pencegahan Konflik, membantu Ketua dalam kegiatannya, serta memberikan dukungan operasional dan administratif untuk operasi lapangan dan kepada lembaga lain.

Bagan 2.4 Badan Terkait OSCE



Sumber : www.osce.org/whatistheosce (2018)

Court of Conciliation and Arbitration adalah pengadilan yang berpusat di Jenewa berfungsi sebagai mekanisme untuk penyelesaian sengketa damai sesuai dengan

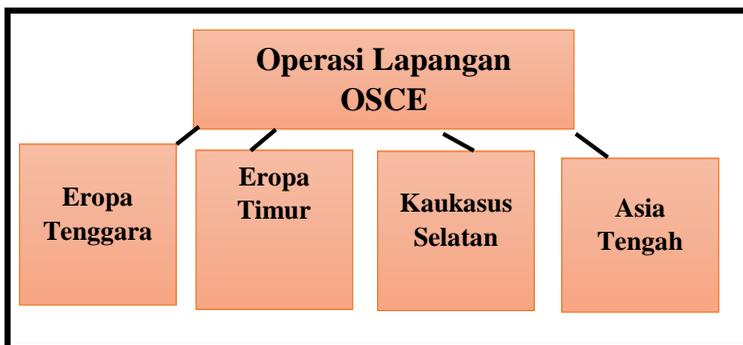
hukum internasional dan komitmen OSCE.. *Joint Consulative Group* bermarkas di Wina bertugas membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa. *Open Skies Consulative Commission* bertemu secara teratur di Wina dan terdiri dari perwakilan dari masing-masing 34 negara yang telah menandatangani Perjanjian Skies Terbuka. (OSCE, 2018)

F. Misi yang Dijalankan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) dan Pembentukan Minks Group

a. Misi yang Dijalankan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE)

Dalam menjalankan misinya, OSCE hadir dalam bentuk operasi lapangan. OSCE hadir dalam berbagai wilayah melalui operasi lapangan. Dimana, operasi lapangan memungkinkan OSCE untuk mengatasi krisis yang muncul, dan di banyak tempat memainkan peran penting pasca-konflik, serta membantu memulihkan kepercayaan di antara masyarakat yang terkena dampak.

Bagan 2.5 Operasi Lapangan OSCE



Sumber : www.osce.org/whatistheosce (2018)

Dalam kawasan Eropa Tenggara OSCE hadir di Albania, misi ke Bosnia dan Herzegovina, misi di Kosovo, misi ke Montenegro, misi ke Serbia, misi ke Skopje. Lalu, di Eropa Timur OSCE hadir pada misi ke Moldova, koordinator proyek

di Ukraina, misi pemantauan khusus ke Ukraina, misi pengamat di Pos Pemeriksaan Rusia Gukovo dan Donetsk. Dalam wilayah Kaukasus Selatan, OSCE hadir dalam konflik Nagorno-Karabakh yang ditangani oleh OSCE *Minks Group*. Yang terakhir, di Asia Tengah, OSCE hadir di Ashgabat, kantor program di Astana, kantor program di Bishkek, kantor program di Dushanbe, koordinator proyek di Uzbekistan.

b. Pembentukan *Minks Group*

Minks Group merupakan badan OSCE yang dibentuk untuk menangani misi di Kaukasus Selatan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Pada pertemuan di Helsinki pada tahun 1992, Dewan CSCE meminta diadakannya konferensi tentang konflik Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia dan Azerbaijan. Acara ini diadakan di Minsk dengan menyediakan sebuah forum untuk negosiasi menuju penyelesaian damai bagi kedua negara. Pada tahun 1994, KTT Budapest OSCE mendirikan Minsk Group. *Co-Chairs* dari *Minsk Group* adalah Duta Besar Igor Popov dari Federasi Rusia; Stéphanie Visconti dari Perancis; dan Tuan Andrew Schofer dari Amerika Serikat. *Minks Group* memiliki anggota tetap, yaitu Belarus, Jerman, Italia, Swedia, Finlandia, dan Turki, serta Armenia dan Azerbaijan. *Minsk Group*, memiliki tujuan untuk memelopori upaya OSCE dalam menemukan solusi damai untuk konflik Nagorno-Karabakh.

Co-Chairs Minsk Group juga diberi mandat untuk mengunjungi wilayah tersebut secara teratur, melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, dan mengadakan pertemuan dengan *Chief in Office* dan anggota *Minsk Group* untuk memberi penjelasan mengenai setiap progres dalam upaya mereka. Selain itu, *Co-Chairs* juga ditugaskan untuk mengatur jalannya negosiasi antar kedua belah pihak yang diharapkan mampu mendapatkan keputusan dan kesepakatan mengenai penghentian konflik bersenjata bagi kedua belah pihak, dan mempromosikan proses perdamaian dengan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian multinasional OSCE.

Bab ini menjelaskan, OSCE pada awalnya merupakan sebuah konferensi keamanan Eropa dengan nama CSCE. OSCE memiliki 57 negara anggota, yang juga berkontribusi dalam hal pendanaan organisasi. Struktur OSCE dibagi menjadi badan pengambilan keputusan dan eksekutif serta badan terkait OSCE. Pada 1992, dibentuk *Minsk Group* untuk menangani konflik Nagorno-Karabakh.